

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM TERJADINYA KEPAILITAN DAN PELAKSANAAN EKSEKUSI ASET YANG TERMASUK DALAM BOEDEL PAILIT YANG TERLETAK DI LUAR NEGERI DALAM HAL TERJADINYA *CROSS BORDER INSOLVENCY* (KEPAILITAN LINTAS NEGARA)

Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan dan perkembangan kegiatan perekonomian yang berkesinambungan, banyak sekali pelaku usaha, baik dalam bentuk perorangan maupun badan hukum yang membutuhkan pendanaan yang begitu besar guna melanjutkan roda bisnisnya. Para pembisnis melakukan bisnis tersebut didalam maupun di luar negeri.

Untuk melakukan usaha dan menjalaninya tentu para pengusaha membutuhkan dana dalam bisnis tersebut. Hal tersebut membuat Debitur melakukan suatu pinjaman kepada Kreditur dalam melakukan suatu pinjam meminjam harus adanyalah suatu jaminan yang mana apabila perusahaan tersebut pailit maka akan ada pengganti atas harta yang sudah dipinjamkan. Akan tetapi apabila Debitur menaruh aset yang sudah dijaminakan di luar dari teritorial Negara Indonesia apakah tetap dapat dilakukan eksekusi atau tidak dalam hal tersebut .

Dengan demikian untuk mengetahui isu mengenai *Cross Border Insolvency* (Kepailitan Lintas Negara), maka dari itu penting juga bagi Indonesia untuk turut melakukan reformasi terhadap instrumen hukumnya dalam mengatasi masalah kepailitan lintas batas tersebut baik dengan mengadakan dan meratifikasi perjanjian internasional maupun memperbaiki instrumen hukum.

ABSTRACT

JURIDICIC REVIEW DUE TO LEGAL CONSEQUENCES AND IMPLEMENTATION OF INSOLVENCY BORDER EXECUTION INCLUDING BANKING BOEDELS WHICH ARE LOCATED OUTSIDE OF THE COUNTRY IN THE CONSEQUENCES OF CROSS BORDER INSOLVENCY (INSOLVENCY BANKRUPTCY)

In the context of maintaining and continuing the development and development of sustainable economic activities, many business actors, both in the form of individuals and legal entities, require large amounts of funding to continue their business. business people doing this business at home and abroad.

To do business and run it, of course, entrepreneurs need funds in the business. This makes the Debtor make a loan to the Creditor in making a loan and there must be a guarantee which if the company is bankrupt, there will be a substitute for the assets that have been lent. However, if the Debtor places assets that have been pledged outside of the territory of the Indonesian State, whether or not execution can still be carried out in this matter.

Therefore, to find out the issue of Cross Border Insolvency, it is also important for Indonesia to participate in reforming its legal instruments in overcoming the problem of cross-border bankruptcy both by entering into and ratifying international treaties and improving legal institutions. bearing in mind that there is no specific regulation regarding cross-border bankruptcy in Indonesia, both in national and international legal instruments.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
PERNYATAAN LAPORAN PENELITIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Berpikir	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II	20
ASPEK ASPEK HUKUM KEPAILITAN	20
A. Pengertian pailit menurut hukum Indonesia	20
1. Pengertian Pailit dan Kepailitan	20
2. Dasar Hukum Kepailitan	22
3. Syarat- syarat pernyataan pailit	25
4. Pengertian Kreditur dan Debitur.....	27
5. Hak dan Kewajiban Kreditur.....	29
6. Hak dan Kewajiban Debitur	32
B. Pengaturan Boedel Pailit di Indonesia	33
1. Pengertian Boedel Pailit	33
2. Tujuan Boedel Pailit	35
C. Pengertian Kurator.....	43

D. Tugas dan Wewenang Kurator	44
E. Kewenangan Kurator	45
F. Tanggung Jawab Kurator	46
G. Cross Border Insolvency	47
1. Pengertian Cross Border Insolvency	47
2. Pengaturan <i>Cross Border Insolvency</i> di Indonesia	47
BAB III	52
TINJAUAN PENGATURAN EKSEKUSI BOEDEL PAILIT	52
A. Eksekusi Boedel Pailit di Indonesia	52
1. Hukum Acara Perdata	52
2. Eksekusi Boedel Pailit Dalam Undang-Undang.....	55
3. Akibat Hukum Terhadap Boedel Pailit.....	56
B. Pengaturan Eksekusi Boedel Pailit Dalam Hal Terjadi Cross Border Insolvency....	57
1. Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents (1961)	57
2. <i>The Hague Convention on the Taking Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters (1970)</i>	61
3. <i>The Hague Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters (1971) and The Supplementary Protocol of 1 February 19 to the Hague Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Judgements in Civil and Commercial Matters</i>	62
BAB IV	64
ANALISIS TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM TERJADINYA KEPAILITAN DAN PELAKSANAAN EKSEKUSI ASET YANG TERMASUK DALAM BOEDEL PAILIT YANG TERLETAK DI LUAR NEGERI DALAM HAL TERJADINYA CROSS BORDER INSOLVENCY (KEPAILITAN LINTAS NEGARA).....	64
A. Akibat hukum terjadinya kepailitan dan pelaksanaan eksekusi dalam hal terjadinya <i>cross border insolvency</i>	64
B. Eksekusi boedel pailit yang ada di luar negeri dalam terjadinya <i>cross border insolvency</i>	78
BAB V	84
PENUTUP	84
1. Kesimpulan	84
2. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87

LAMPIRAN.....

CURRICULUM VITAE.....

